



SUSTAINABLE LIVELIHOOD: PENANGANAN RURAL POOR DI INDIA

Oleh :

Nela Agustin Kurnianingsih¹, Didik Wahyu²

¹ Program Magister Pengembangan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, Semarang 50275
email : nela.agustin@gmail.com

² Program Magister Pengembangan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, Semarang 50275

ABSTRAK

Pada saat ini kemiskinan sudah menjadi hal yang melekat pada pembangunan yang tidak merata dan adil (*inequality*) di seluruh wilayah. *Rural poor* muncul sebagai salah satu kondisi kemiskinan yang muncul di wilayah pedesaan. Kualitas SDM yang rendah dan hanya mengandalkan pada sektor pertanian dan sektor *low income* serta ditambah adanya peningkatan jumlah populasi menjadi elemen penegasan keeksistensian kemiskinan di wilayah pedesaan, seperti yang dialami di India.

Peningkatan kemiskinan di pedesaan memaksa pemerintah India untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan baik. Namun, dalam prinsip pembangunan lama, pembangunan yang memperhatikan *development thinking* terkadang akan berseberangan dengan pembangunan yang tertuju pada *environmental thinking*. Oleh sebab itu, *sustainable livelihood* yang lebih memperhatikan pembangunan berkelanjutan terhadap masyarakat dan SDA yang menjadi sumber kehidupan dipilih sebagai pembangunan yang mampu menyeimbangkan *development thinking* dengan *environmental thinking*.

Kata Kunci : Sustainable Livelihood, Penanganan, rural poor

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan kebutuhan manusia yang ditantang dengan keterbatasan kebutuhan yang ada dan tantangan peningkatan kesejahteraan masyarakat membuat para aktor pembangunan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan perencanaan pembangunan secara baik. Upaya yang dilakukan terkadang menimbulkan ketidaksetaraan pembangunan di seluruh wilayah. Keeksistensian kemiskinan di wilayah pedesaan dan disparitas ekonomi yang terjadi antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi

bukti nyata dari proses pembangunan yang tidak merata.

Wilayah pedesaan yang dalam rantai kehidupan sebagai produsen atau tempat untuk mengolah SDA yang ada memberikan proses pembangunan yang berbeda dengan pembangunan di wilayah perkotaan. Oleh sebab itu, terkadang pembangunan yang berpandangan secara *development thinking* yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam waktu dekat hingga menengah secara ekonomis memiliki kemungkinan akan berbenturan dengan *environmental thinking* yang lebih berpandangan jauh untuk kelestarian lingkungan, seperti yang dijelaskan oleh

Robert Chambers (1992). Konsep *Sustainable Livelihood muncul* sebagai suatu upaya yang di dalamnya ada penyeimbangan hubungan antara aktivitas manusia dengan alam, yang tidak mengurangi kesempatan untuk generasi mendatang dapat menikmati kualitas hidup setidaknya sama baiknya dengan kita sendiri. Dengan kata lain *sustainable livelihood* merupakan upaya yang lebih memperhatikan keberlanjutan semua aspek kehidupan dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi (*economic*), pengentasan kemiskinan (*social*) dan lingkungan yang lebih bermanfaat (*enviroment*). Seperti yang diadopsi oleh pemerintah India untuk menangani kemiskinan di wilayah pedesaan dengan tetap memperhatikan *livelihood* yang ada. Terlebih lagi dijelaskan oleh Chambers & Conway (1991) bahwa *sustainable livelihood* merupakan suatu integrasi antara *capability*, *equity* dan *sustainability*. Dengan begitu, penggunaan konsep ini mampu mewujudkan pembangunan secara merata dan adil sesuai kemampuan/ potensi yang dimiliki wilayah pedesaan.

Negara India yang menjadi negara berpenduduk tertinggi no 2 di dunia ini ternyata memiliki permasalahan kemiskinan yang telah ada semenjak 1974, bahkan tahun 1992 tercatat sekitar 35% penduduk miskin di dunia berada di Negara India. Di samping itu, ternyata pada tahun 2000 sekitar 70% penduduk miskin di India tinggal di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, pemerintah berusaha menyelesaikan permasalahan kemiskinan di wilayah pedesaan dengan mengadopsi konsep *sustainable livelihood*.

1.2. Tujuan

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan konsep *sustainable livelihood* yang dilakukan oleh pemerintah India terhadap penanganan masalah kemiskinan di pedesaan, dalam upaya penyeimbangan *development thinking* dengan *environmental thinking* sehingga pembangunan lebih memperhatikan keberlanjutan masyarakat dan lingkungan.

II. TEORI

2.1. *Sustainable Livelihood*

Sustainable atau dapat diartikan sebagai keberlanjutan memiliki beberapa perhatian, seperti yang dijelaskan oleh Pangan (1987 dalam Chambers, 1992) yang menjelaskan bahwa keberlanjutan dalam keamanan dan mata pencaharian memiliki beberapa pemahaman, antara lain:

- Mata pencaharian dapat didefinisikan sebagai saham dan uang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
- Keamanan mengacu pada kegiatan untuk mengamankan kepemilikan atau sumber daya dan pendapatan, untuk mengurangi resiko.
- Berkelanjutan mengacu pada pemeliharaan atau peningkatan produktivitas sumber daya secara jangka panjang.

Dimaksudkan oleh Pangan keberlanjutan keamanan mata pencaharian mengintegrasikan penduduk; sumber daya; lingkungan; dan pengembangan dalam empat hal, yaitu kestabilan populasi, pengurangan migrasi, menangkali eksploitasi dari pusat; dan mendukung manajemen sumber daya yang berkelanjutan.

Menurut Chambers (1992) proses keberlanjutan terkait lingkungan, pengembangan, dan kemiskinan terbentuk dari empat pemikiran, yaitu:

- pemikiran mengenai lingkungan (*environment thinking/ET*);
- pemikiran mengenai pengembangan (*development thinking/DT*);
- pemikiran mengenai penghidupan (*livelihood thinking/LT*);
- pemikiran mengenai penghidupan yang berkelanjutan (*sustainable livelihood thinking/SLT*).

Chambers (1992) menjelaskan bahwa ET dan DT merupakan bentuk pemikiran 'pertama' dari profesionalisme normal. Namun di sisi lain, ET dan DT mempunyai perbedaan bahkan bisa menimbulkan kontra diantara keduanya, terutama berkaitan dengan efek negatif yang ditimbulkan pada lingkungan akibat dari pengembangan oleh kaum miskin.

- ET memandang bahwa ekonom berkontribusi lebih pada pembangunan ekonomi dan produksi dari lingkungan (tanah, air, pohon, tanaman, dll) serta memperhatikan manfaat bagi masa depan.
- DT memandang bahwa pembangunan ekonomi dan produksi tersebut hanya dapat dimanfaatkan untuk jangka menengah dan manfaat masa depan hanya dapat dihitung menggunakan analisis biaya manfaat.

Oleh karena itu, perlu ada pemikiran yang mampu memandang dua hal tersebut sebagai satu hal yang sama-sama penting, ditambah dengan pemikiran *livelihood thinking* yang menganggap orang miskin sebagai titik awal untuk membuat sebuah pola baru, dimana prioritas utamanya bukan lingkungan ataupun produksi, tetapi mata pencaharian/penghidupan, dan menekankan kelangsungan hidup jangka pendek, kepuasan kebutuhan pokok, serta keamanan kelangsungan hidup jangka panjang. Dan pemikiran *sustainable livelihood* muncul sebagai konsep pemikiran yang paling tepat untuk penggabungan semua hal, terutama terkait *development* dengan *environment* dengan menjunjung sistem keberlanjutan.

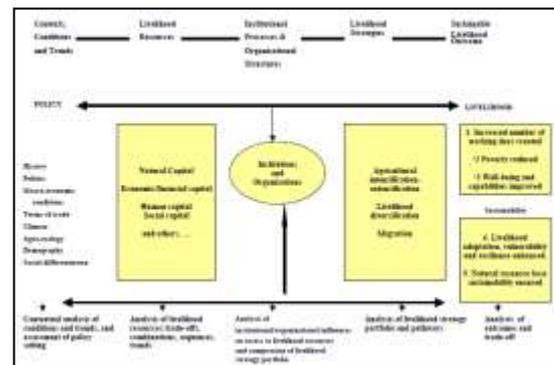
2.2. Sustainable Livelihood Approach

SLA (*Sustainable Livelihood Approach*) merupakan suatu pendekatan yang sifatnya luas, multidisiplin dan bertujuan untuk mempromosikan pemahaman secara lebih baik dan respon terhadap berbagai dimensi kemiskinan. Ide-ide yang mendasari pendekatan itu tidak baru, tetapi dibangun dari tren pengembangan berkelanjutan

gabungan dengan konsep ekonomi dan ekologi. SLA juga memasukkan sistem ekologi, konsep sensitivitas dan ketahanan, mengacu pada sejauh mana sistem penghidupan mampu bereaksi terhadap guncangan atau jenis stres (sensitivitas) dan seberapa baik bisa "Bangkit kembali" dan pulih dari guncangan tersebut (ketahanan). Kerentanan SLA berhubungan dengan konsep-konsep, dan sensitivitas serta ketahanan yang demikian dimasukkan sebagai aspek yang memiliki keterkaitan dengan faktor kemiskinan (Allison dan Horemans, 2006a).

Scoones (1998, dalam Krantz, 2001) menjelaskan bahwa *sustainable rural livelihood* memiliki model kerangka kerja seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Framework dari *sustainable rural livelihood*



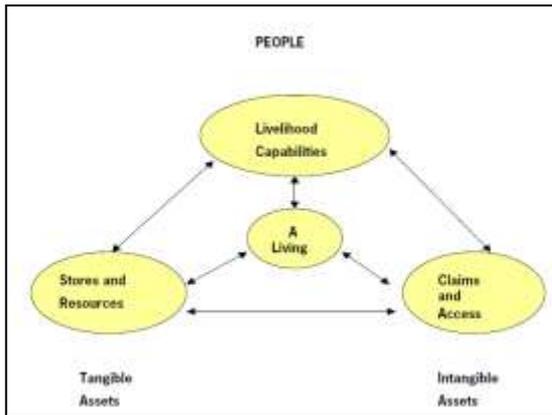
Sumber: Scoones, 1998 dalam Krantz, 2001

Beberapa model *sustainable livelihood approach* (SLA), antara lain:

a. Model dari UNDP

Model ini mencoba untuk mengintegrasikan semua aktivitas pendukung yang ada pada kehidupan masyarakat miskin dan kelompok yang rentan terhadap rencana. Pada model ini, teknologi lebih dianggap sebagai pendukung dalam investasi sosial dan ekonomi. Implementasi program biasanya berada pada level rumah tangga, lihat Gambar 2.

Gambar 2. SLA model UNDP

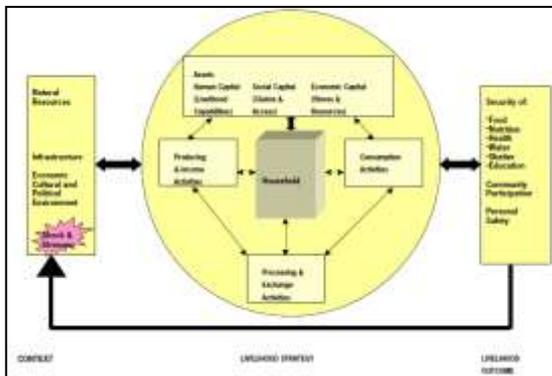


Sumber: Krantz, 2001

b. Model dari CARE

Model dari CARE memiliki 3 bagian fundamental, yaitu posisi kemampuan masyarakat (seperti skill, pendidikan, kesehatan dan psikologis), akses menuju ke aset-aset *tangible* dan *intangible*, dan keberadaan kegiatan ekonomi yang ada di wilayah tersebut, lihat Gambar 3.

Gambar 3. SLA model CARE



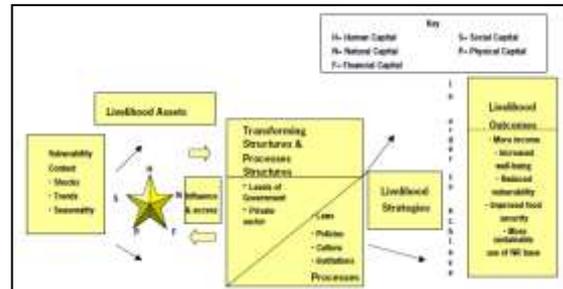
Sumber: Krantz, 2001

c. Model dari DFID

Pendekatan yang ditawarkan oleh DFID adalah lebih meningkatkan efektivitas stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan program pengurangan kemiskinan. Aktivitas pembangunan yang dilakukan berprinsip pada: *people-centred* (mampu memahami masyarakat dengan baik), *responsive and participatory* (masyarakat miskin berpartisipasi sebagai aktor

pembangunan dan mengetahui tanggung jawabnya), multi-level (pembangunan disemua level aktivitas), *conduct in partnership* (hubungan yang baik antara sektor public dengan privat), *sustainable* (keberlanjutan dalam ekonomi, institusi, sosial dan lingkungan), dan *dynamic* (program bersifat dinamis dengan menyesuaikan kondisi alam yang berubah-ubah), lihat Gambar 4.

Gambar 4. SLA model DFID



Sumber: Krantz, 2001

III. SUSTAINABLE LIVELIHOOD: PENANGANAN RURAL POOR DI INDIA DENGAN DFID'S SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Pembangunan muncul sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas hidup maupun kualitas manusia itu sendiri. Begitu banyak hal yang perlu dikaji dalam pembangunan agar peningkatan bisa berjalan dengan baik. Sebut saja salah satunya adalah kemiskinan. Disparitas ekonomi atau pembangunan yang tidak adil (*inequality*) memunculkan kondisi ini dalam kehidupan. Pemerintah sebagai aktor dalam pembangunan dituntut untuk mampu menangani masalah kemiskinan ini, seperti yang dilakukan di India, dimana pemerintah bekerja sama dengan *stakeholder* terkait berusaha melepaskan predikat kemiskinan dari masyarakat India. Bersama-sama melepaskan kemiskinan dengan mengusung konsep *sustainable livelihood*.

3.1. Kemiskinan Di India

Kemiskinan menjadi harga mati sebagai permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh suatu negara atau wilayah. Seperti halnya yang terjadi di negara berkembang seperti India. Kemiskinan di negara sudah menjadi masalah utama yang menggrogoti negara sejak kemerdekaannya di tahun 1951.

Kondisi kemiskinan di India sudah muncul semenjak kemerdekaannya di tahun 1951. Namun, baru di tahun 1974 kemiskinan mendapat sorotan dari pemerintah. Tercatat bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (1 \$/day oleh World Bank), terhitung dari 171 juta penduduk atau sekitar 47% dari total penduduk India di tahun 1951 meningkat menjadi 321 juta penduduk atau sekitar 56% dari total penduduk India di tahun 1974 yang berada di bawah garis kemiskinan. Bahkan World Bank mencatat bahwa pada tahun 1992, angka kemiskinan di India mencapai 458 juta penduduk atau sekitar 52,5% dari jumlah total penduduk India, dan berkontribusi sebesar 35% dari jumlah total penduduk miskin di dunia (Fox, 2002). Dengan angka *poverty line* sebesar 1\$/day (oleh World Bank) atau 49 rupee (oleh pemerintah India). Untuk lebih jelasnya grafik pertumbuhan angka kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 5.

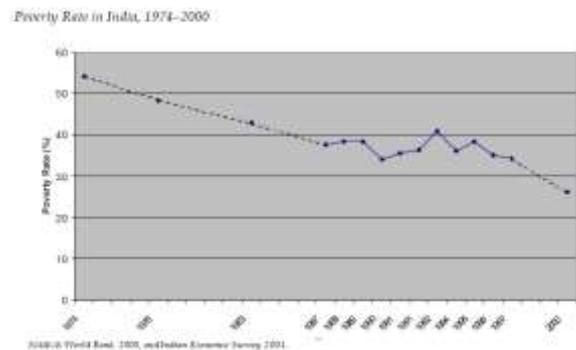
Gambar 5. Pertumbuhan Angka Kemiskinan di India Tahun 1951-1974



Munculnya perkembangan teknologi, perindustrian, peningkatan lapangan

pekerjaan, dan perhatian pemerintah terkait penanganan kemiskinan, seperti yang menjadi semboyan Jawaharal Nehru yang mengadopsi tujuan Mahatma Gandhi, *removing "every tear from every eye"* dan dilanjutkan selama dua decade pemerintahan oleh putri Nehru, dengan semboynya "*Removing Poverty*", ternyata memberikan dampak positif berupa penurunan masyarakat miskin yang cukup tajam di India. Tercatat bahwa pada tahun 1999-2000, angka kemiskinan di India mengalami penurunan sangat tajam, sekitar 26% yang menunjukkan bahwa penduduk miskin di India tinggal 260 juta penduduk. Untuk pertumbuhan kemiskinan di India setelah tahun 1974 dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Pertumbuhan Angka Kemiskinan di India Tahun 1974-2000



3.2. Rural Poor di India

Perkembangan atau lebih tepatnya pembaguan yang tidak merata di India antara daerah perkotaan dengan pedesaan menimbulkan kondisi yang cukup memperhatikan. Apabila dikaitkan dengan angka kemiskinannya, ternyata pemerintah mencatat bahwa di tahun 2000, 70% dari penduduk miskin di India ternyata bertempat tinggal di wilayah pedesaan. Seperti yang telah disebutkan, bahwa pembangunan yang tidak merata dan adil (*inequality*) hanya menimbulkan peningkatan *gap* (perbedaan) yang semakin tinggi antara *income urban* dengan *income rural*, yang akhirnya hanya menambah besar *gap* kesejahteraan di kedua wilayah. Proporsi penduduk miskin di

wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Proporsi Penduduk Miskin Di Perkotaan dengan Pedesaan

Inlidi: Poverty Rate and Numbers in Poverty, 1974-2000

Year	Head Count Poverty Rate (%)			Number in Poverty (millions)		
	Coastal	Rural	Urban	Total	Rural	Urban
1973/74	54.9	56.4	49.8	323	261	60
1977/78	31.9	54.1	45.2	329	264	65
1983	44.5	45.7	46.8	323	252	71
1987/88	38.9	38.1	36.2	307	232	75
1992/94	30.8	37.3	32.4	318	244	74
1999/2000	26.2	27.1	25.9	340	193	147

Source: India Economic Survey, 1980-2000.

Sumber: *Indian Economy Survey, 2001-2002 dalam Fox, 2002*

3.3. Sektor Ekonomi di Rural Poor India

Kemiskinan yang terjadi pada daerah pedesaan di India disinyalir disebabkan pada sektor pertanian yang tidak dapat berkembang dengan baik. Rendahnya produksi dan kualitas SDM pada sektor pertanian membuat para pekerja sektor pertanian tidak mampu bersaing dengan pekerja sektor lainnya. Tercatat pada tahun 2007, rata-rata pertumbuhan untuk perekonomian di pedesaan mengalami keadaan yang *stagnant* yang berkisar antara angka 2% hingga 2,5%. Padahal pada daerah pedesaan terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 1,75%. Dengan demikian, semakin mempertegas bahwa kemiskinan masih mengancam daerah pedesaan.

3.4. Program-Program Sustainable Livelihood dari DFID yang Diterapkan

Sustainable livelihood yang dipilih sebagai konsep pembangunan penanganan kemiskinan di pedesaan India dianggap menjadi pilihan yang tepat untuk pembangunan yang tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan SDM dalam mengolah lingkungannya. Seperti yang dijelaskan oleh Scoones (1998, dalam Rakodi, 2002) yang mengatakan *livelihood* akan mampu berlanjut saat bisa menghadapi ancaman yang ada, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan atau potensi

yang dimiliki tanpa merusak SDA yang ada. Program-program pemerintah India banyak bekerja sama dengan beberapa stakeholder yang terkait. Salah satunya program hasil kerja sama dengan *Global Environmental Facility (GEF)* yang tentunya berkonsentrasi pada proses *sustainable livelihood* di *rural poor* yang berorientasi pekerjaan pada sektor pertanian.

Nama Program:

National Agricultural Innovation Project (NAIP)

Tujuan Program:

Untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan dengan cara transformasi berkelanjutan atas orientasi sistem pertanian di India dari swasembada pangan menuju orientasi pasar.

Sasaran program:

- Untuk mempromosikan pendekatan dan teknik untuk pengelolaan lahan pantai dan daerah air yang rusak,
- Melestarikan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dengan menggunakan potensi lokal (tanaman, hewan dan ikan) untuk intensifikasi pertanian dan ketahanan mata pencaharian, dan
- Pada peningkatan kapasitas bertujuan untuk merespon perubahan iklim dan variabilitas kekeringan dan daerah rawan banjir.

Pelaksanaan Program NAIP akan dilakukan dengan kerja sama dari beberapa stakeholder, seperti:

- Petani
- Sektor privat
- Masyarakat sipil
- Organisasi sektor public
- Pemerintah
- Lembaga donor

Hasil yang ingin dicapai:

- Peningkatan luas areal lahan yang berkonsep *sustainable land management*.
- Peningkatan jumlah petani yang mengadopsi teknik-teknik pertanian adaptasi perubahan iklim.
- Peningkatan konservasi biodiversity oleh petani melalui intensifikasi pertanian dan *livelihood security*.
- Peningkatan hasil pertanian sebesar 30-35%.
- Sedikitnya 30 organisasi public dan swasta membuat kebijakan dan kegiatan untuk memerangi degradasi lahan, pemanfaatan keanekaragaman hayati lokal, dan adaptasi pada perubahan iklim.

Tiga komponen utama yang perlu dilakukan dalam NAIP:

- Perubahan sistem penelitian pertanian dengan ICAR sebagai katalisator.
Proses penelitian ICAR ini bekerja sama dengan *State Agricultural University*. Penelitian ini ditujukan untuk peningkatan sektor pertanian, seperti: keamanan pangan dan nutrisi, diversifikasi pertanian, produksi kebutuhan sehari-hari dan hasil olahan ikan, manajemen SDA yang baik, analisis kebijakan dan pemasaran, dll.
- Penelitian pada tahap produksi hingga sistem konsumsi.
- Penelitian pada *sustainable rural livelihood security*.

Program-program yang termasuk dalam NAIP:

- Harmonisasi konservasi biodiversity dengan intensifikasi pertanian.
- Manajemen keberlanjutan untuk degradasi kawasan laut dan DAS.

- Peningkatan program-program pertanian yang mampu beradaptasi dengan lingkungan.
- ICAR project management.

Melalui program dan langkah-langkah yang dilakukan pada program NAIP ini, diketahui bahwa konsep *sustainable livelihood* yang dilakukan mampu menyeimbangkan orientasi tujuan peningkatan kualitas produksi di pasaran (berorientasi ekonomis → *development thinking*) dengan tujuan peningkatan dan konservasi biodiversity melalui teknik/manajemen pertanian yang baik (*environmental thinking*). Selain itu, program ini juga melakukan langkah *human capacity building* bagi para stakeholder terkait teknologi dan manajemen pertanian yang baik agar tetap menghasilkan tingkat produksi yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, yang tentunya tanpa harus merusak lingkungan.

IV. KESIMPULAN

Pembangunan masyarakat miskin di wilayah pedesaan memiliki tahapan atau pendekatan yang berbeda dengan pembangunan wilayah perkotaan. Wilayah pedesaan yang menjadi produsen dalam pengolahan SDA memiliki hubungan yang sangat erat dengan lingkungan. Agar kelestarian lingkungan tetap terjaga dan pembangunan masyarakat miskin bisa tetap berjalan dengan tidak menimbulkan dampak negative bagi lingkungan, maka konsep *sustainable livelihood* yang bertindak sebagai penyeimbang *development* dengan *environment* dipilih sebagai langkah yang paling tepat.

Keberlanjutan pembangunan dengan konsep *sustainable livelihood* menjadi salah satu pilihan pemerintah India dalam upaya pengurangan kemiskinan di wilayah pedesaan. Konsep dengan memikirkan seluruh stakeholder dan meningkatkan efektivitas stakeholder dalam setiap tugasnya dianggap mampu mewujudkan

sustainable livelihood. Hubungan kerja sama yang baik antara sektor public, sektor privat, dan komunitas mampu menghasilkan pembangunan yang baik dan lancar.

V. REFERENSI

- Anonim. (2007). "India's Rural Poor: Why Housing Isn't Enough to Create Sustainable Communities," dalam *India Knowledge @ Wharton*. 02 Juli 2012. knowledge.wharton.upenn.edu/india/articlepdf/4219.pdf?CFID=213483113&CFTOKEN=11554514&jsessionid=a830928fe23fb72568077834525c3673f7e5
- Anonim. (2006). "Sustaining Economic Growth, Rural Livelihoods, and Environmental Benefits: Strategic Options for Forest Assistance in Indonesia." Jakarta, Indonesia: World Bank.
- Anonim. (2001). "Sustainable Rural Livelihoods Security through Innovations in Land and Ecosystem Management," dalam *project paper*. 05 juli 2012. http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2009/07/21/000333038_20090721012441/Rendered/PDF/494800PJPR0P11101Official0Use0Only1.pdf
- Chambers, Robert & Gordon R. Conway. (1991). "Sustainable Rural Livelihood: Practical Concepts for The 21st Century." 02 Juli 2012. <http://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/775/Dp296.pdf>
- Chambers, Robert. (1992). "Real-life Economics: Understanding Wealth Creation – Sustainable Livelihoods: The Poor's Reconciliation of Environment and Development, (Ed) Paul Ekins and Manfred Max-Neef." London & New York: Routledge. 02 Juli 2012. <http://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/141/rc175.pdf?sequence=2>
- Fox, James W. (2002). "Poverty in India Since 1974," dalam *Nathan Associatic Inc*. 02 Juli 2012. <http://www.ekh.lu.se/ekhcgu/teaching/401d4/poverty%20in%20india.pdf>
- Krantz, Lasse. (2001). *The Sustainable Livelihood Approach to Poverty Reduction*. Swedish: SIDA. 02 Juli 2012. http://www.forestry.umn.edu/prod/groups/cfans/@pub/@cfans/@forestry/documents/asset/cfans_asset_202603.pdf
- Rakodi, Carole. (2002). "Urban Livelihood: A Livelihood Approach – Conceptual Issues and Definitions." London: Earthscan Publication Ltd.